Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Surabaya, 18 April 2018

REPUBLIK INDONESIA

Outline

Kementerian PPN/ Bappenas

1. Pencapaian Pembangunan Nasional
2. Sasaran Ekonomi Makro
3. Pokok-Pokok RKP 2019
4. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur
5. Hasil Rakortek Renbang Jawa Timur
6. KPBU dan PINA Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

1 Pencapaian Pembangunan Nasional

Pemerataan pembangunan menunjukkan perkembangan positif...

Ketimpangan menurun ditandai oleh koefisien gini yang semakin membaik

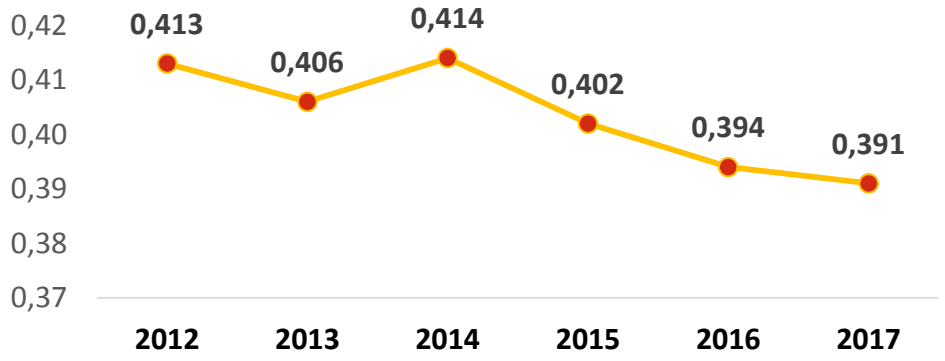

Sumber: Susenas, September 2012-2017

Tingkat **kemiskinan menurun**, menjadi 10,12 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.

Persentase penduduk miskin berkurang (persen)

10,96
2014(Sept)

10,12
2017(Sept)

Jumlah penduduk miskin berkurang (Juta Jiwa)

27,73
2014(Sept)

26,58
2017(Sept)

Tingkat **pengangguran menurun** menjadi 5,50 persen dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang (persen)

5,94
2014 (Agustus)

5,50
2017 (Agustus)

Jumlah Pengangguran berkurang (juta jiwa)

7,24
2014 (Agustus)

7,04
2017 (Agustus)

Indeks Pembangunan Manusia membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016.

IPM

Tahun 2015	Tahun 2016
69,55	70,18

Sumber: BPS 2014-2017

Ekonomi Indonesia Menunjukkan Perbaikan Secara Bertahap… (1/2)

Komponen	2016	2017				2017
		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	**5,01**	**4,94**	**4,95**	**4,93**	**4,97**	**4,95**
Konsumsi LNPRT	6,64	8,07	8,52	6,02	5,24	**6,91**
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	**2,14**
PMTB	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	**6,15**
Ekspor	-1,57	8,41	2,80	17,01	8,50	**9,09**
Impor	-2,45	4,81	0,20	15,46	11,81	**8,06**
Pertumbuhan Sektor						
Pertanian	3,36	7,15	3,23	2,77	2,44	**3,81**
Pertambangan	0,95	-1,22	2,12	1,84	0,08	**0,69**
Industri	4,26	4,28	3,50	4,85	4,46	**4,27**
Industri Non Migas	**4,43**	**4,80**	**3,93**	**5,46**	**5,14**	**4,84**
Perdagangan	4,03	4,61	3,47	5,20	4,47	**4,44**
Transportasi & Pergudangan	7,45	8,06	8,80	8,88	8,21	**8,49**
Informasi dan Komunikasi	8,88	10,48	11,06	8,82	8,99	**9,81**
Jasa Keuangan & Asuransi	8,90	5,99	5,94	6,16	3,85	**5,48**
PDB	**5,03**	**5,01**	**5,01**	**5,06**	**5,19**	**5,07**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah kembali

- Konsumsi rumah tangga di Q4-2017 membaik, walaupun masih sedikit di bawah 5,0%. Faktor penyebabnya:
  - ✓ ***Smart consumers***: masyarakat Indonesia lebih memilih dalam berbelanja yang seperlunya.
  - ✓ ***Leissure consumers****:* lebih menyenangi aktivitas terkait rekreasi.
  - ✓ ***Saving behavior:*** lebih banyak menabung terutama kelompok menengah ke atas.
- Industri non-migas dalam dua kuartal terakhir tumbuh cukup baik (Q3 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional).

Pertumbuhan Ekonomi (Persen, YoY)

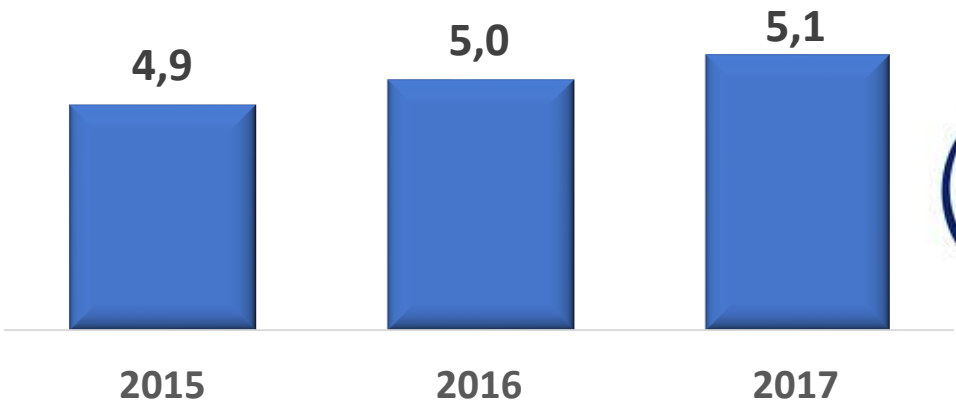

Sumber: BPS (diolah)

Ekonomi Indonesia Menunjukkan Perbaikan Secara Bertahap... (2/2)

Sebaran Ekonomi Wilayah Sedikit Bergeser ke Arah Kawasan Timur Indonesia

KONTRIBUSI PDRB PULAU TERHADAP PDB NASIONAL

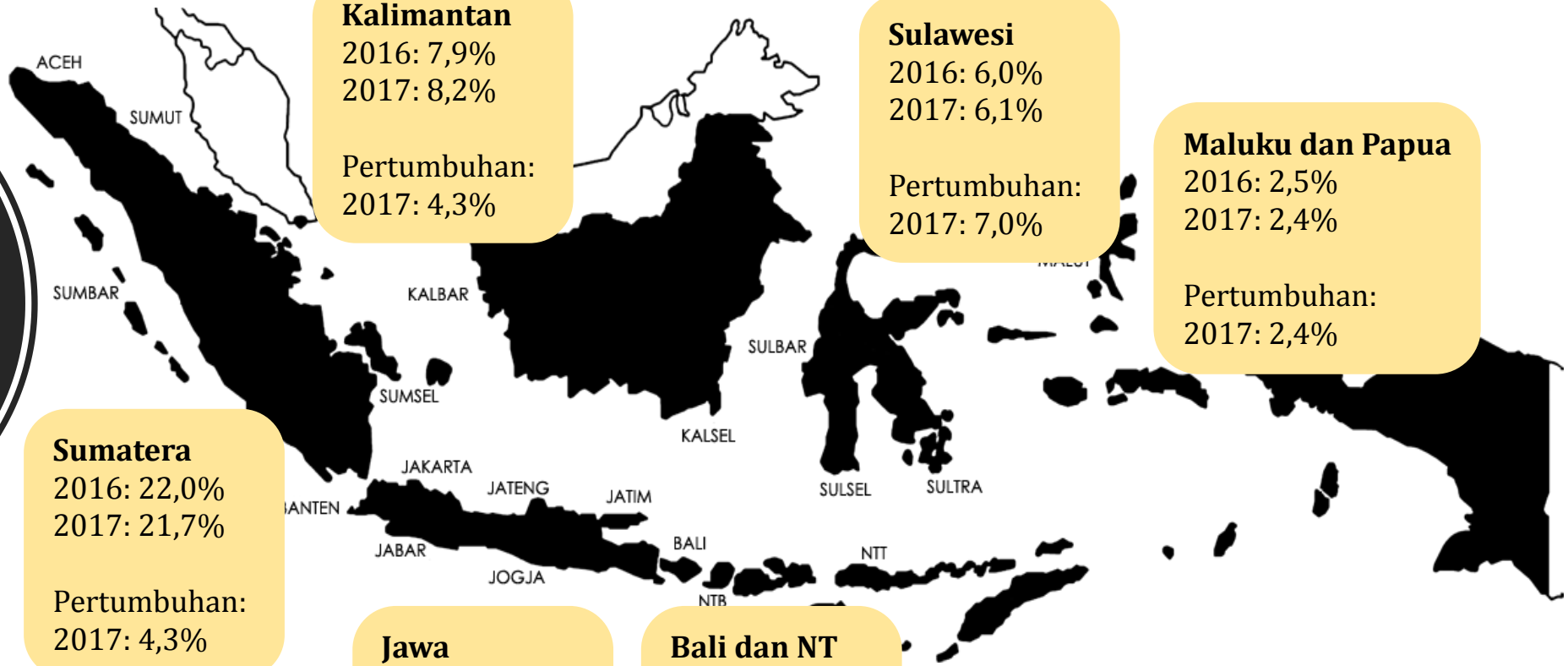

Kalimantan
2016: 7,9%
2017: 8,2%

Pertumbuhan:
2017: 4,3%

Sulawesi
2016: 6,0%
2017: 6,1%

Pertumbuhan:
2017: 7,0%

Maluku dan Papua
2016: 2,5%
2017: 2,4%

Pertumbuhan:
2017: 2,4%

Sumatera
2016: 22,0%
2017: 21,7%

Pertumbuhan:
2017: 4,3%

Jawa
2016: 58,5%
2017: 58,5%

Pertumbuhan:
2017: 5,6%

Bali dan NT
2016: 3,1%
2017: 3,1%

Pertumbuhan:
2017: 3,7%

Isu Strategis Dalam Mencapai Pemerataan Pembangunan

Infrastruktur konektivitas untuk pemerataan antar wilayah

Pembangunan Bandara Baru

2015	2016	2017
2 Bandara	2 Bandara	3 Bandara
1.Anambas 2.Namniwel	1.Miangas 2.Morowali	1.Werur 2.Maratua 3.Koroway Batu

Pengembangan Angkutan Barang Bersubsidi Tol Laut

2015	2016	2017
3 Rute	6 Rute	9 Rute

Kumulatif

Pembangunan Jalan Baru dan Jalan Tol

Jalan Baru (kumulatif)

2015	2016	2017
1.286 km	1. 845 km	2.393 km

Jalan Tol (kumulatif beroperasi)

2015	2016	2017*
132 km	176 km	332 km

*per November 2017

Penyediaan Lintasan Kereta Api Perintis

2015	2016	2017
3 Lintas	6 Lintas	6 Lintas

Kumulatif

Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia **meningkat** dari **61** (2013/2014) ke **52** (2017/2018)

Sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2017-2018

Ketersediaan Energi Dan Pembangunan Pita Lebar Daerah Terpencil

Rasio Elektrifikasi *(Persen)*

2017 95,35

Kapasitas Pembangkit *(GW)*

2017 60,49

Konsumsi Listrik per Kapita *(kWh)*

2017 1.011,5

Keterangan: Angka Kumulatif

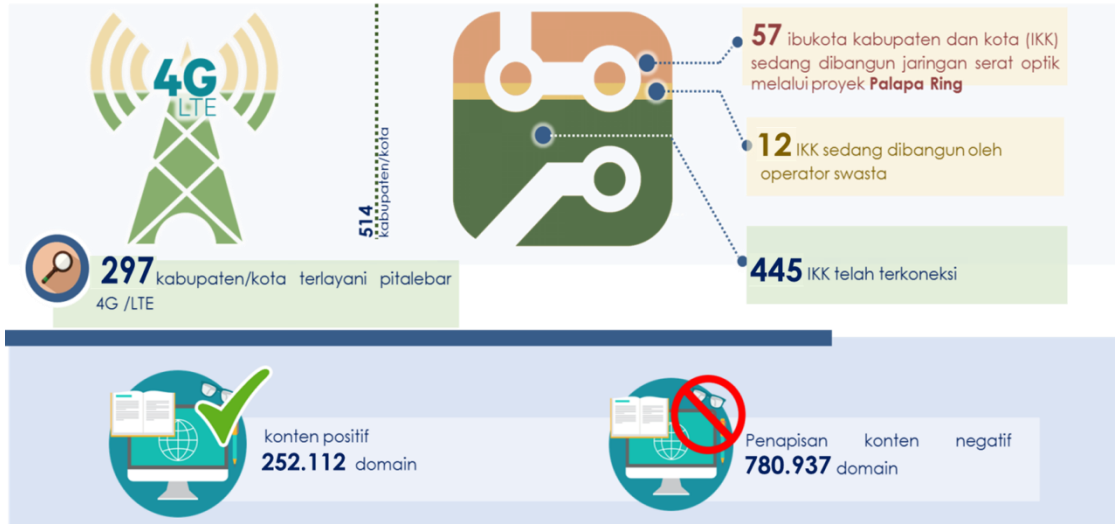

2 Sasaran Ekonomi Makro

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019

- Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
- **Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.**
- Pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

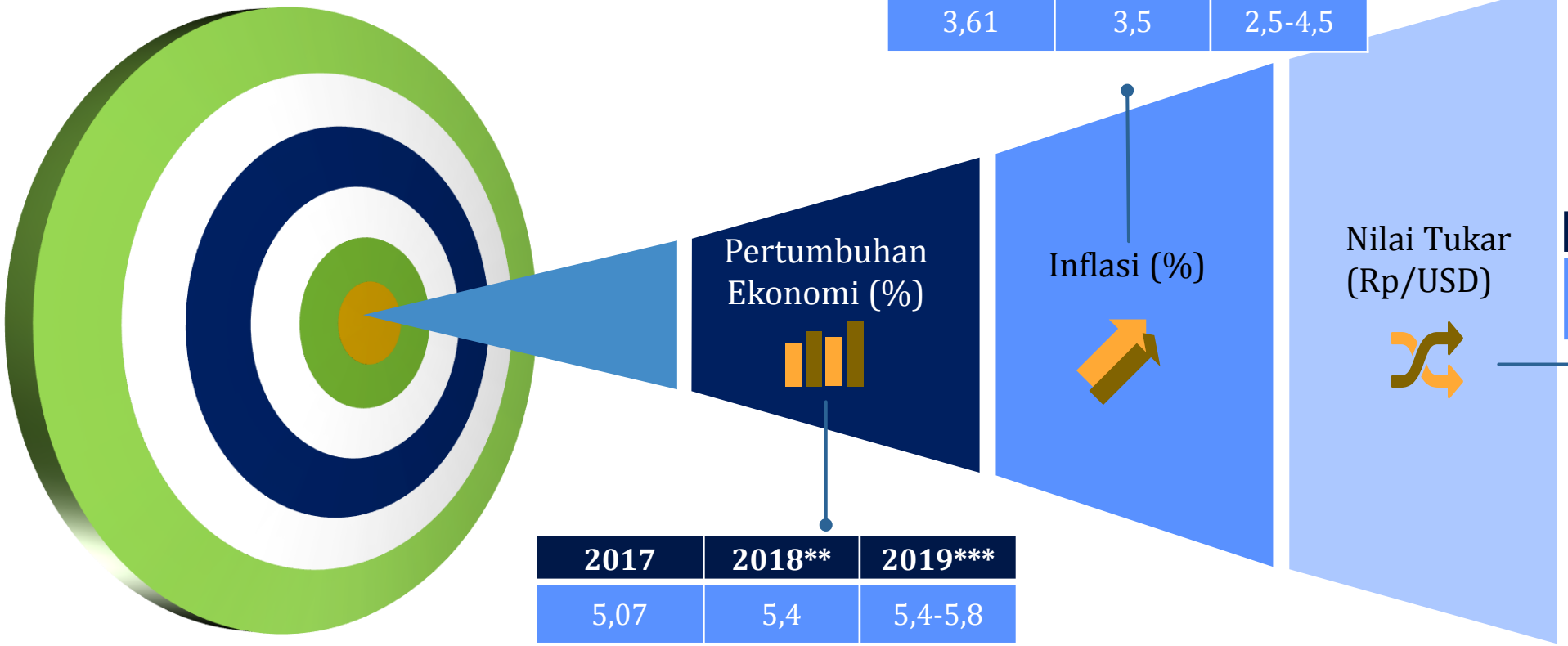

2017*	2018**	2019***
3,61	3,5	2,5-4,5

2017	2018**	2019***
5,07	5,4	5,4-5,8

2017	2018**	2019***
13.382	13.400	13.500-13.700

Catatan:
* Inflasi Y-o-Y
** Sasaran pada APBN 2018
*** Hasil rapat interdep asumsi makro 6 Februari 2018

Outlook dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Sisi Pengeluaran

Konsumsi LNPRT

2018**	2019
9,3	9,2-11,1

Konsumsi Pemerintah

2018**	2019
5,4	2,8-3,7

PMTB

2018**	2019
7,1	7,5-8,3

Ekspor

2018**	2019
4,0	6,0-7,3

Konsumsi Rumah Tangga

2018**	2019
5,0	5,0-5,1

Impor

2018**	2019
4,8	6,3-7,6

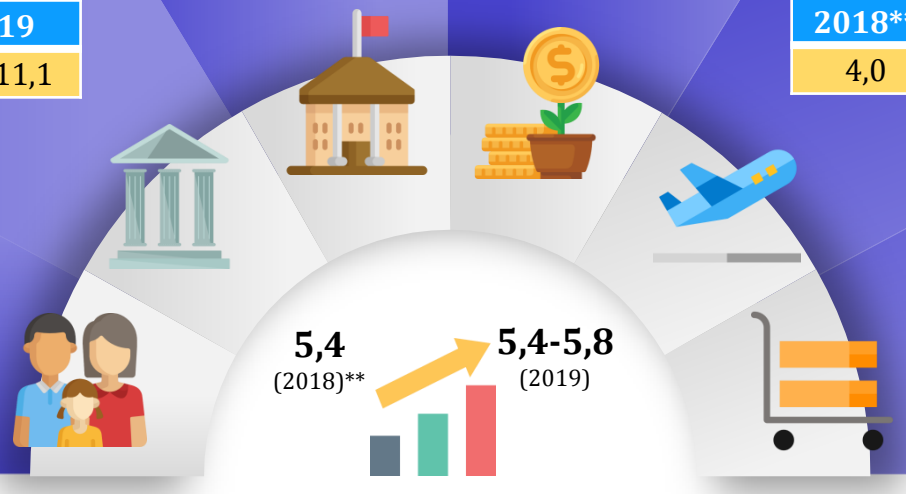

PERTUMBUHAN EKONOMI

Investasi dan konsumsi rumah tangga diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

Sisi Lapangan Usaha

	2018**	2019
Pertambangan	0,4	0,8
Listrik	3,4	6,2-6,6
Konstruksi	6,9	6,9-7,2

Pertanian

2018**	2019
4,0	3,9-4,1

Industri Pengolahan

2018**	2019
5,1	5,1-5,6

Perdagangan

2018**	2019
6,1	5,4-6,0

	2018**	2019
Infokom	11,0	10,7-11,3
Jasa Keuangan	7,8	8,1-8,7
Transportasi	8,9	8,6-9,0

Sumber: ** Prognosa/Estimasi Sementara 2018 dan Perhitungan Bappenas

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

Tingkat Kemiskinan
8,5–9,5%

Rasio Gini
0,38–0,39

Indeks Pembangunan Manusia
71,98

Pertumbuhan Ekonomi
5,4–5,8%

Tingkat Pengangguran Terbuka
4,8–5,2%

3 Pokok-Pokok RKP 2019

RKP 2019
Kesinambungan Implementasi *Money Follows Program*

Menajamkan Prioritas Nasional

2018		2019
10 PN	→	5 PN
30 PP	→	24 PP

Memastikan Pelaksanaan Program

Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3)

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Tema dan Prioritas Nasional

Tema

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Prioritas Nasional

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Isu Strategis Prioritas Nasional 1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Lambatnya penurunan angka kemiskinan

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar

Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

PRIORITAS NASIONAL 1

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- Percepatan Penurunan *Stunting*

4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

- Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Air Minum, dan Sanitasi Layak

1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

- Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

- Penyediaan Afirmasi Pendidikan

5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

- Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

PN

PP

KP

Isu Strategis Prioritas Nasional 2

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan

Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat

Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan

Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana

Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan

PRIORITAS NASIONAL 2

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

1 Peningkatan Konektivitas dan TIK

- Pengembangan Pelabuhan *Hub* dan *Feeder* Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut

2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

- Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antar Kabupaten/ Kota dan Kampung

3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

4 Penanggulangan Bencana

- Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

5 Peningkatan Sistem Logistik

- Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian

PN

PP

KP

Isu Strategis Prioritas Nasional 3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja

Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri

Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah

Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

PRIORITAS NASIONAL 3

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA

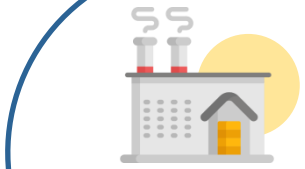

2 Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

- Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik

4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

- Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi

1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

- Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

3 Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

- Pengembangan 10 Kawasan Pariwisata, 4 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan

5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

- Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier

PN

PP

KP

Isu Strategis Prioritas Nasional 4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat

Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat

Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri

Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

PRIORITAS NASIONAL 4

PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR

2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

- Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan

4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

- Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

- Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

PN

PP

KP

Isu Strategis Prioritas Nasional 5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional

Kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN

Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara

Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi

Perlunya penguatan diplomasi yang efektif

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

PRIORITAS NASIONAL 5

STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU

1 Kamtibmas dan Keamanan Siber

- Penguatan Kelembagaan Siber serta Keamanan Ruang Siber

2 Kesuksesan Pemilu

- Pengamanan Pemilu

3 Pertahanan Wilayah Nasional

- Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara

4 Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

- Integrasi *e-Government*

5 Efektivitas Diplomasi

- Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional

PN

PP

KP

4 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur di Atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017

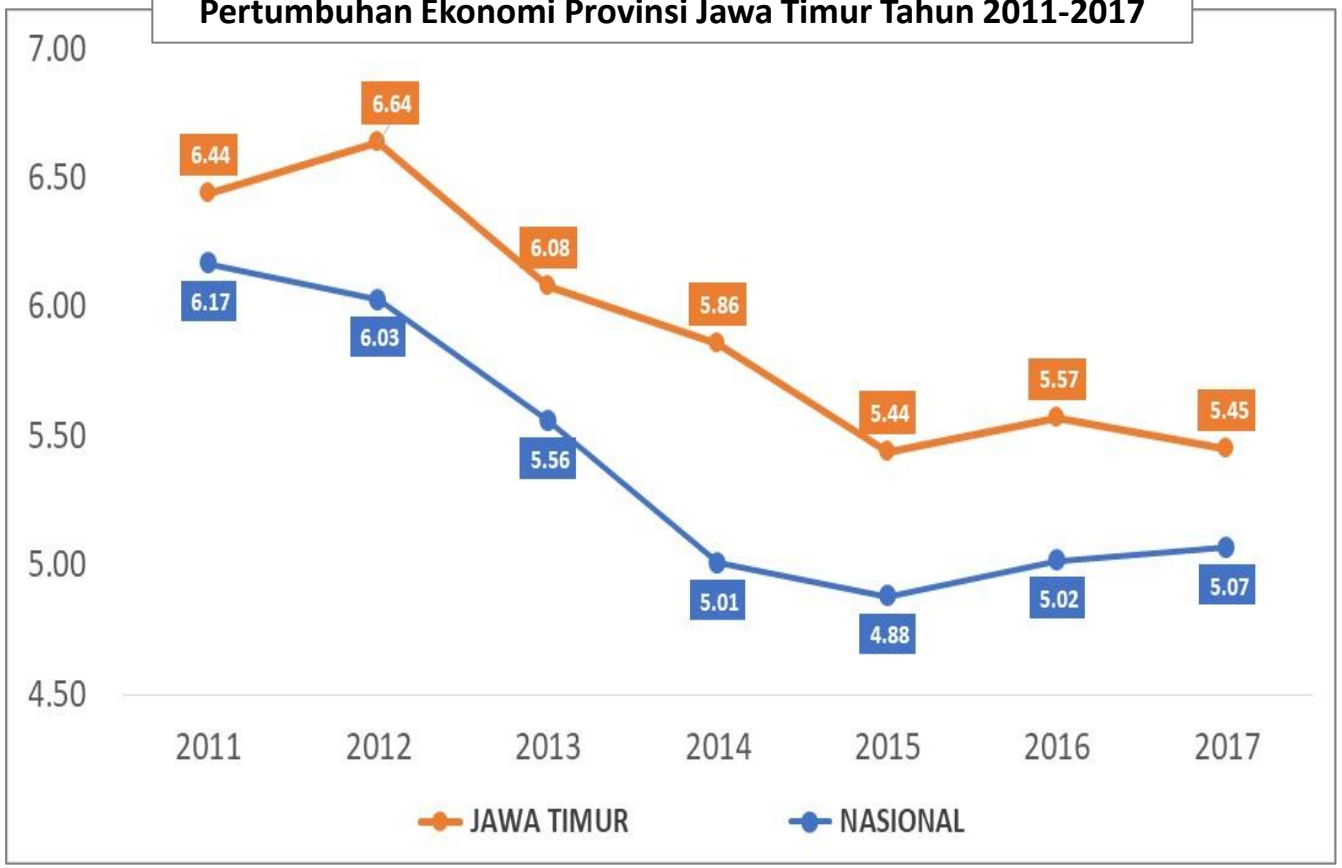

Sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi:

a. Sektor Industri Pengolahan
b. Sektor Perdagangan besar dan eceran Sektor
c. Sektor Kontruksi
d. Sektor Informasi dan Komunikasi
e. Sektor Pertambangan dan Penggalian
f. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dari Sisi Produksi Tahun 2013-2017

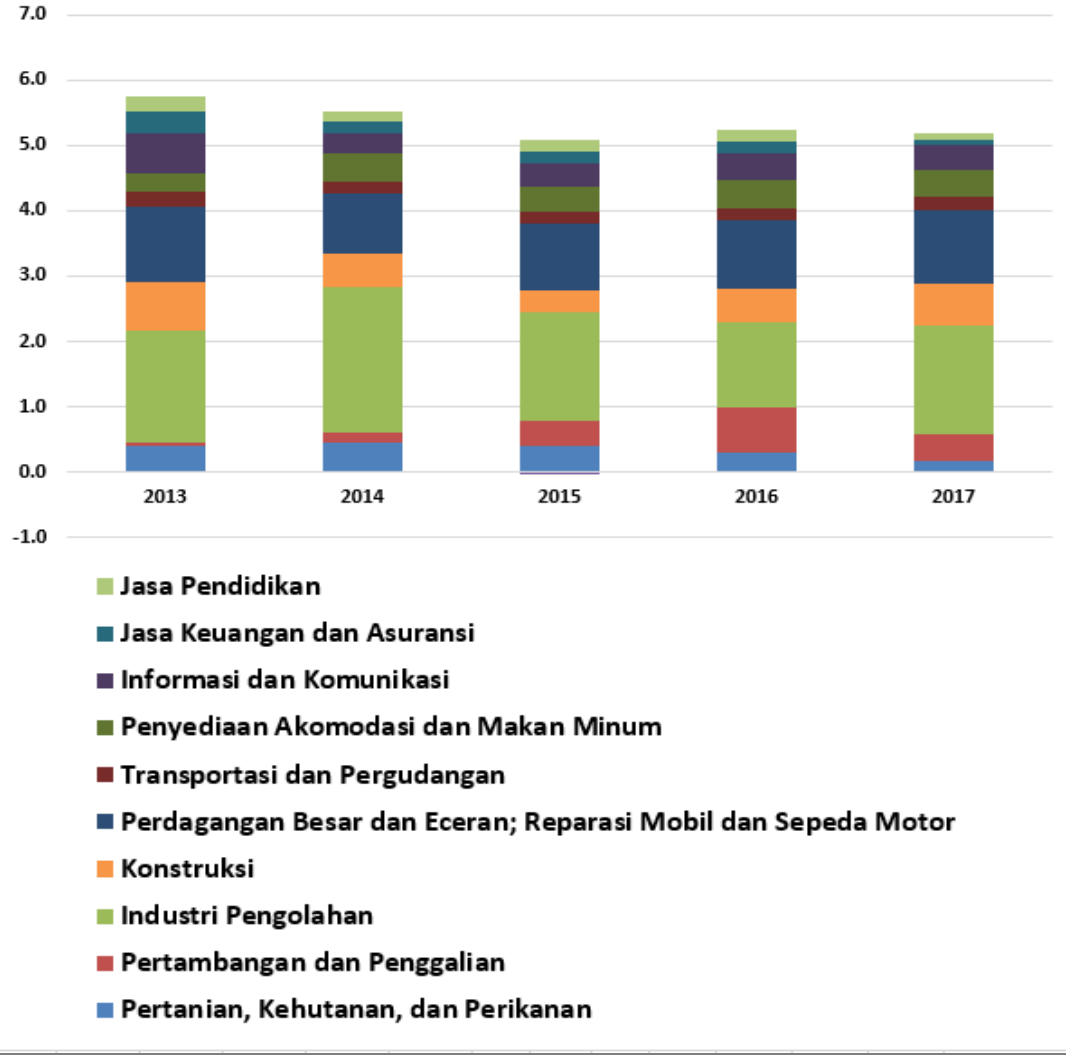

Share Ekonomi Provinsi Terhadap Pulau dan Nasional

Rata-Rata *Share* Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2017

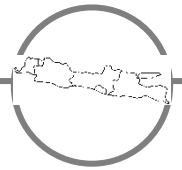

Terhadap
Pulau Jawa
25,13 %

Share Terbesar
2
Dari 6 Provinsi di
Pulau Jawa

Terhadap Nasional
14,47 %

Share Terbesar
2
Dari 34 Provinsi
secara Nasional

❷ Kab. Sidoarjo
8,57 %

❶ Kota Surabaya
24,19 %

❸ Kab. Pasuruan
8,57 %

SHARE
KABUPATEN / KOTA ❸ TERBESAR TAHUN 2016

TERENDAH: Kota Mojokerto 0,29 %

29,04 %

17,74 %

❷ Perdagangan
Besar dan Eceran

❶ Industri
Pengolahan

13,41 %

❸ Pertanian

❸ SEKTOR DENGAN RATA-RATA SHARE TERBESAR TAHUN 2012 S/D 2017

Angka Kemiskinan Lebih Tinggi Dibandingkan Angka Kemiskinan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin 2017

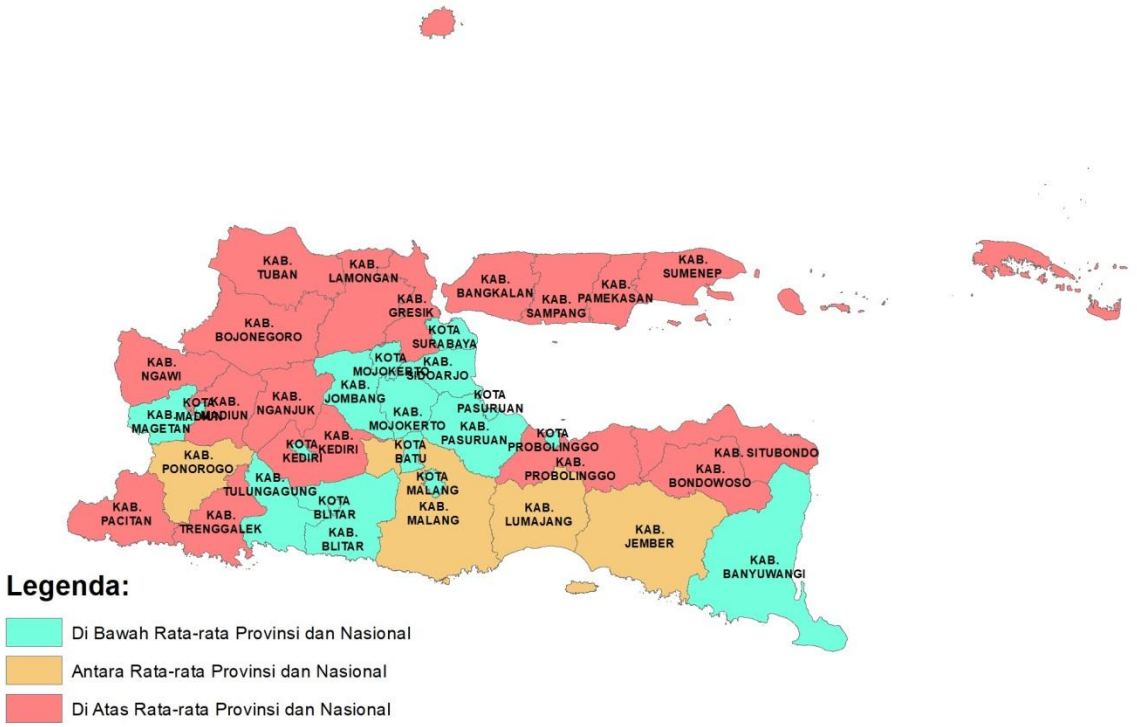

Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2017 (September)

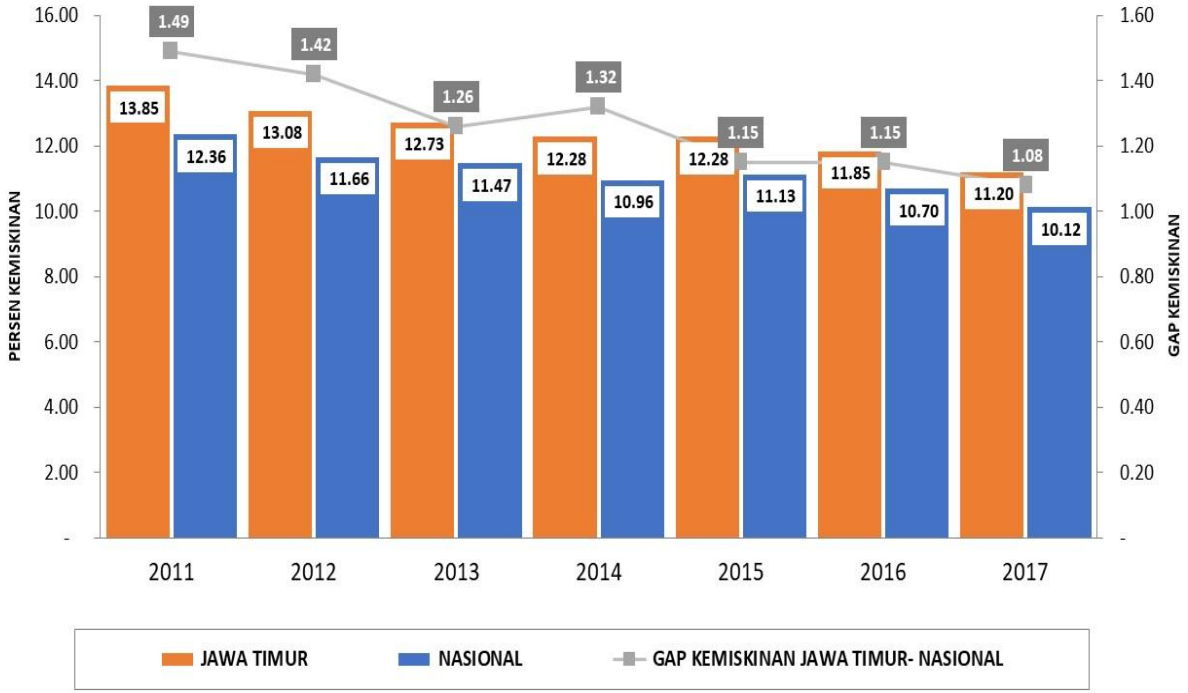

Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan Kemiskinan Nasional, namun cenderung menurun dalam tujuh tahun terakhir dengan laju penurunan lebih cepat dibandingkan nasional

Secara Spasial angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2017 (Maret) terdapat di Kab .Sampang, Kab. Bangkalan , dan Kab. Probolinggo , sedangkan terendah di Kota Malang 4,31 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

❷ Kab. Bangkalan 21,32 %

❶ Kab. Sampang 23,56 %

❸ Kab. Probolinggo 20,52 %

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur Lebih Rendah Dibandingkan TPT nasional

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pola Spasial TPT Tahun 2017 (Agustus)

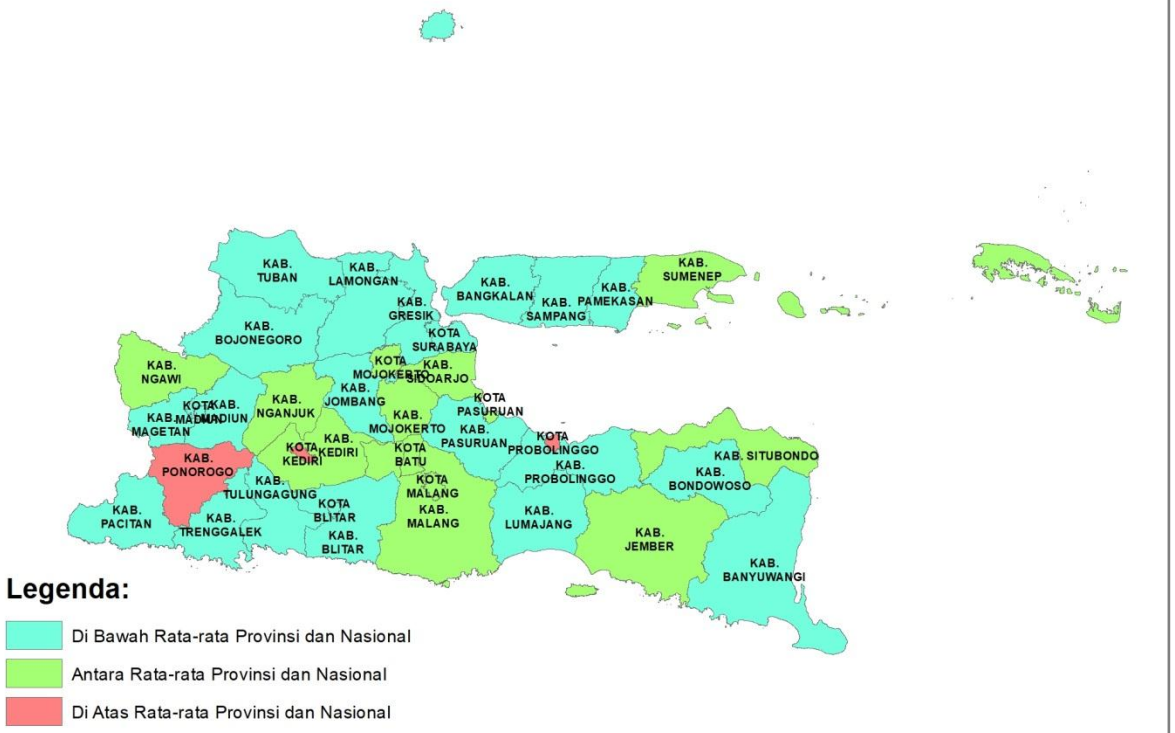

Perkembangan TPT Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2017 (Agustus)

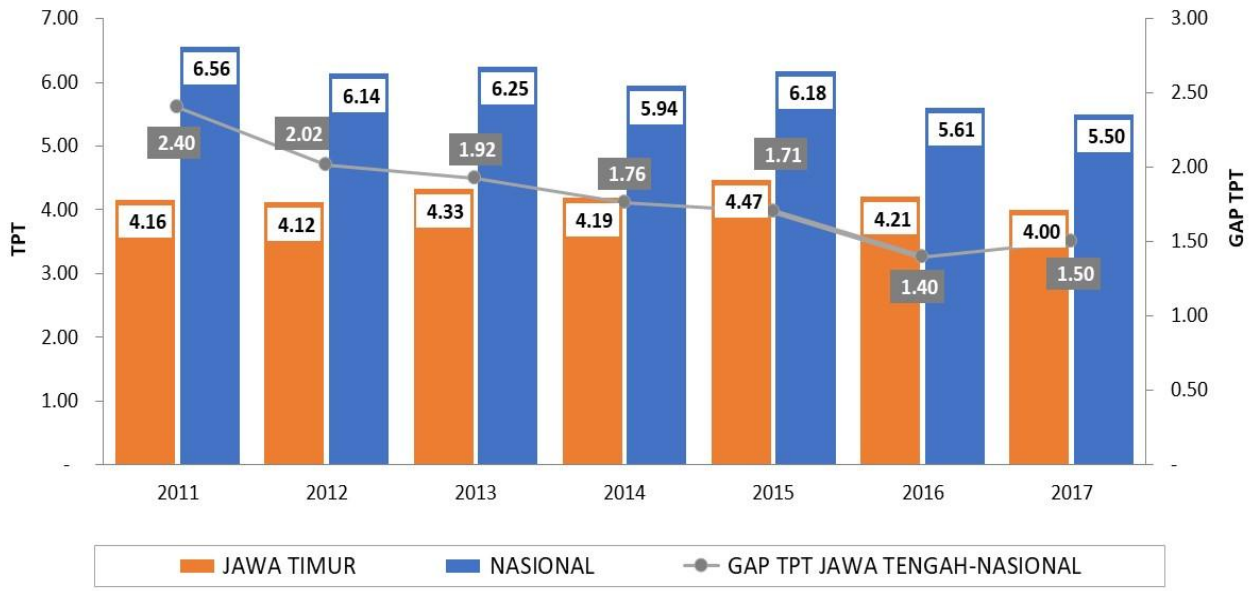

TPT Jawa Timur lebih rendah dibandingkan TPT nasional dan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Secara Spasial, TPT tertinggi pada tahun 2015 (Agustus) terdapat di kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kab. Ponorogo, sedangkan TPT terendah di Kab. Bangkalan 0,85 %

1. Kota Kediri 7,22 %
2. Kota Probolinggo 5,98 %
3. Kab. Ponorogo 5,76 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masih Rendah Dibandingkan IPM Nasional

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pola Spasial IPM Tahun 2016

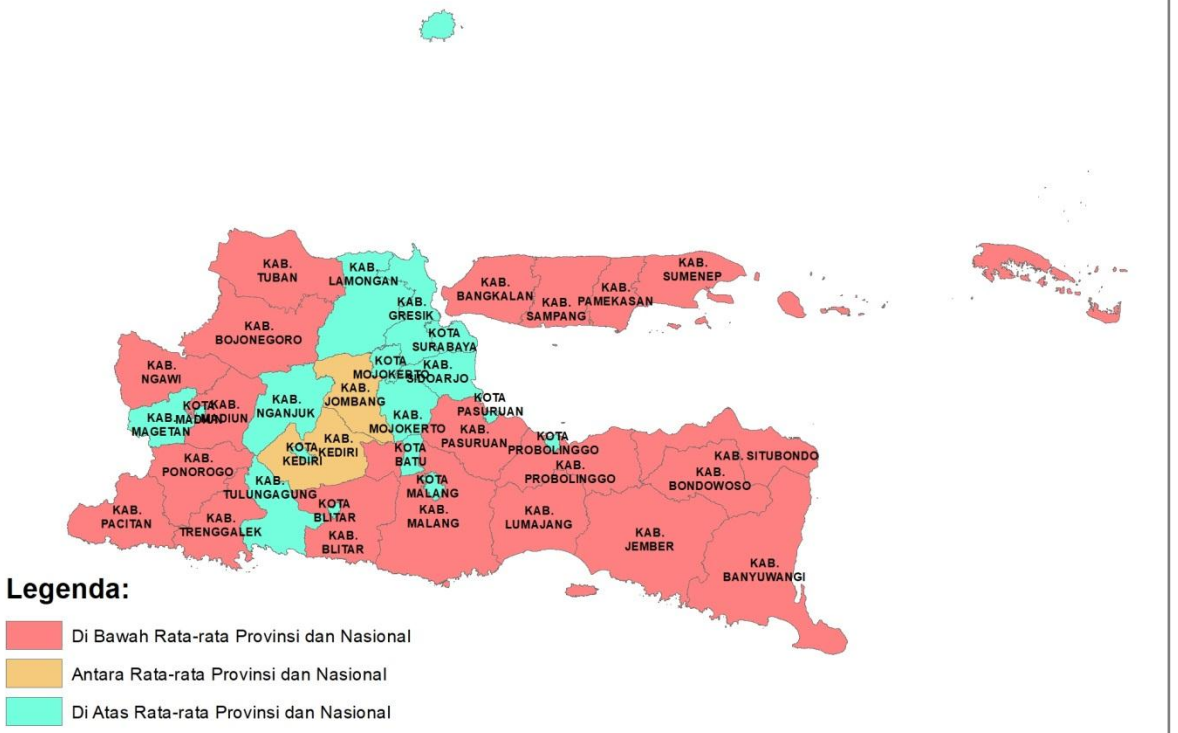

Perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2017

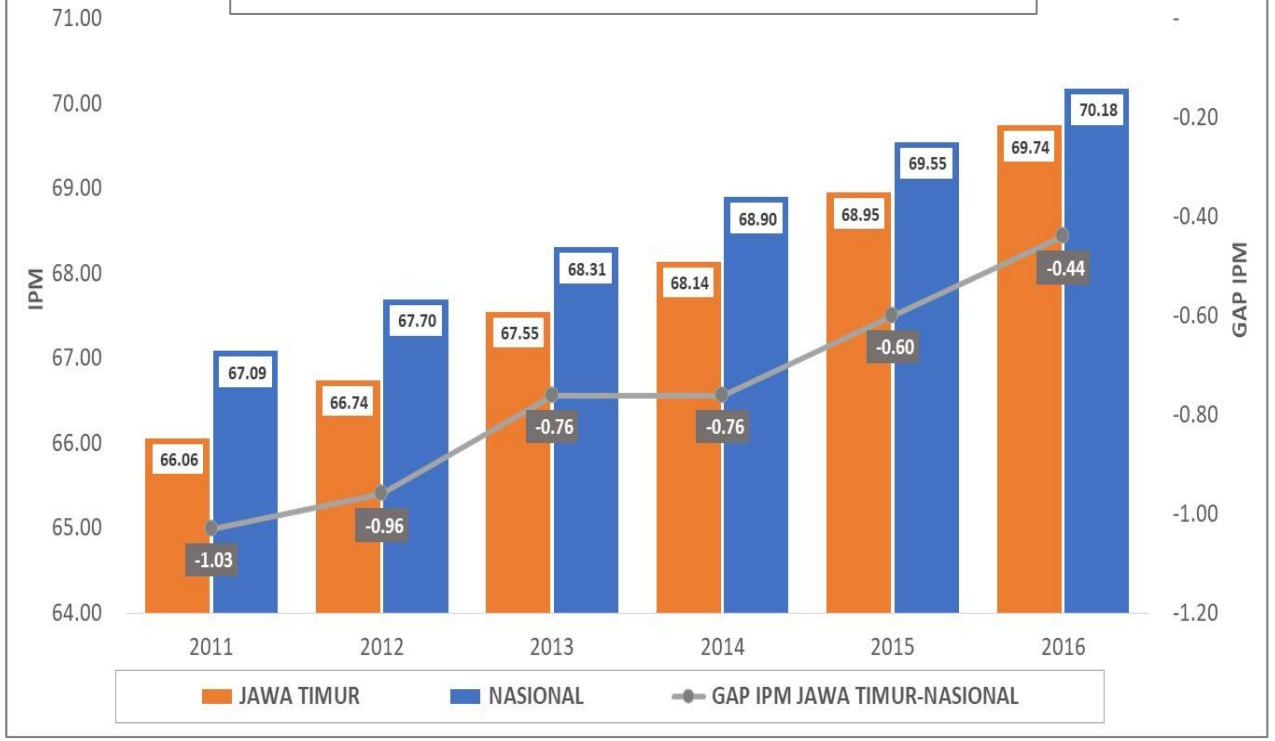

IPM Provinsi Jawa Timur relatif masih rendah dibandingkan IPM Nasional, namun terus menunjukan peningkatan setiap tahunnnya dengan laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan nasional.

Secara spasial IPM terendah terdapat di Kab. Sampang , Kab. Sumenep, dan Kab. Lumajang, sedangkan IPM tertinggi di Kota Surabaya yakni 80,38 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

2 Kab. Sumenep 63,42 %

1 Kab. Sampang 59,09 %

3 Kab. Lumajang 63,74 %

Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Timur

Rumah Tangga Berdasarkan Profil Hunian Tahun 2017 (%)

Indikator	Nasional	Provinsi Jawa Timur
1. Kepadatan hunian (luas lantai perkapita < 7,2 m2)	8,45	4,20
2. Kondisi fisik (Satu atau lebih dari atap, dinding dan lantai tidak layak)	16,85	14,60

Sumber: Diolah dari Susenas 2017

- Persentase hunian tidak layak Provinsi Jawa Timur dilihat dari kondisi luas lantai perkapita pada tahun 2017 **sebesar 4,20% (lebih rendah dari persentase nasional)**
- Persentase hunian tidak layak Provinsi Jawa Timur dilihat dari kondisi fisik pada tahun 2017 **sebesar 14,60% (lebih rendah dari persentase nasional)**

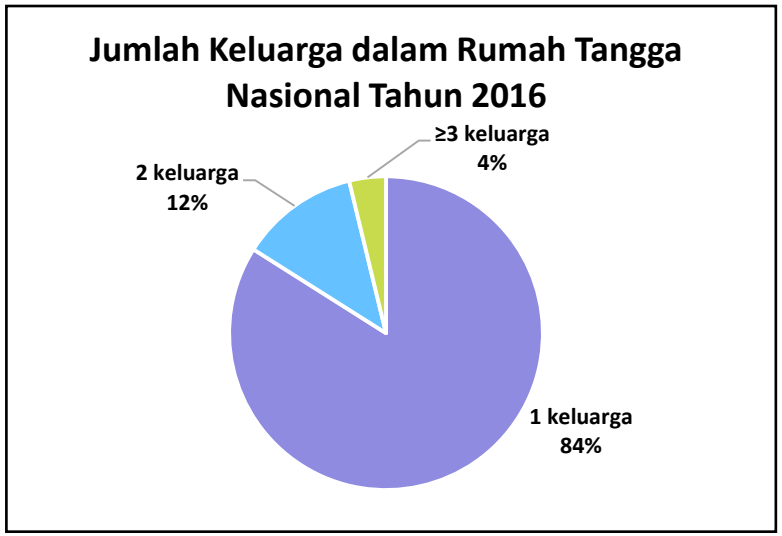

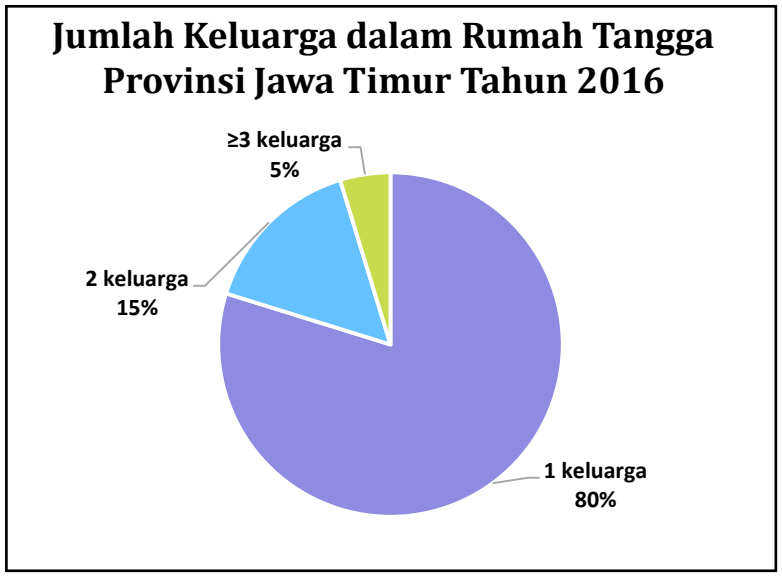

Sumber: Diolah dari Susenas 2016

Kondisi Pembangunan Air Minum

KONDISI EKSISTING

1. Data Kependudukan

Tahun 2016 : 39.057.152 jiwa
Tahun 2019 : 39.804.150 jiwa

Penduduk Tidak Terlayani Akses Air Minum Layak
10.286.780 jiwa

Akses Air Minum Layak
75,54 %

31 PDAM
Status SEHAT

2. Data SPAM

Keterangan	Nilai	Satuan
Jumlah SPAM Terbangun	380	Unit
	35.342	L/dtk
Idle Capacity	7.224	L/dtk
Perkiraan Kebutuhan Tambahan Air Domestik	14.207	L/dtk

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AIR BAKU

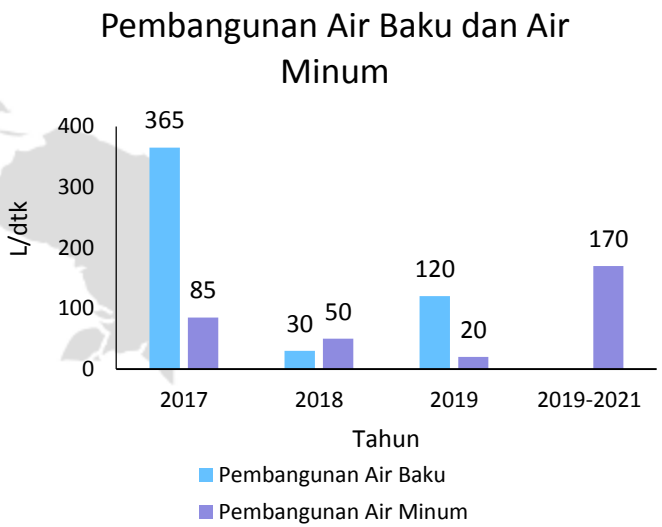

Kondisi Sanitasi di Jawa Timur

Sampah

Pengelolaan Sampah di Jawa Timur

Sumber: BPS 2016, diolah Bappenas

- 26,5% diangkut petugas dan dibuang ke TPS
- 68,5% dibuang sembarangan dan dibakar
- 4% dimanfaatkan untuk didaur ulang, dijadikan kompos, atau diserahkan pada bank sampah

±18.600 ton/hari sampah ditangani dengan tidak baik

Air Limbah Domestik di Jawa Timur

Sumber: BPS 2017, diolah Bappenas

68,6%
Akses Layak

7,8%
Akses Aman
(Bagian dari Akses Layak)

12,34%
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) →
± 4,8 JUTA ORANG

2,93%
BABS "terselubung" (penampungan tinja tidak layak atau tidak ada penampungan) →
±1,1 JUTA ORANG

±1190 ton/hari tinja langsung terbuang ke lingkungan **tanpa terolah**

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Timur Proyeksi Tahun 2019

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

PERTUMBUHAN EKONOMI:

PROVINSI
5,58 %

NASIONAL
5,40 – 5,80 %

TINGKAT KEMISKINAN:

PROVINSI
9,73 %

NASIONAL
8,50 – 9,50 %

TINGKAT PENGANGGURAN:

PROVINSI
3,54 %

NASIONAL
4,80 – 5,20 %

IPM:

PROVINSI
-

NASIONAL
71,98

GINI RASIO:

PROVINSI
-

NASIONAL
0,38 – 0,39

Sumber: Kementerian PPN / Bappenas

5 Hasil Rakortek Renbang Provinsi Jawa Timur

Highlight Hasil Rakortek Renbang Jawa Timur (1/2)

PN 1

Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

- Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan lanjut usia
- Fasilitasi distribusi bantuan pangan non tunai
- Pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Peningkatan mutu pelayanan KPM PKH
- Pengadaan gedung shalter PMKS
- Pelatihan pendampingan literasi karang taruna

Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- Peningkatan pendidikan gizi masyarakat
- Peningkatan surveilans gizi masyarakat
- Peningkatan suplemen gizi masyarakat
- Pelayanan pemeliharaan anak balita dan bayi
- Peningkatan Kompetensi Petugas dalam Penurunan Kematian Ibu

Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

- Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
- Pengadaan komputer untuk sekolah
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
- Pengadaan komputer untuk satuan pendidikan non formal untuk penyelenggaraan UNBK

Highlight Hasil Rakortek Renbang Jawa Timur (2/2)

PN 2

- Reaktivasi jalur kereta api
- Pengadaan sarana kendaraan roda 4 distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

PN 3

- Pengembangan kompetensi SDM kepariwisataan dibidang perhotelan
- Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
- Pelatihan dan pengadaan atau bantuan mesin/peralatan untuk wirausaha industri kerajinan
- Sosialisasi dan pembinaan ketenagakerjaan agar tercapai *industrial peace*
- Peningkatan kompetensi SDM KUKM
- Bimbingan teknis untuk produksi wirausaha industri seperti pangan atau kimia

PN 4

- Pembangunan jaringan irigasi
- Pembangunan bio gas pondok pesantren
- Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
- Pengembangan usaha pangan masyarakat
- Pemberdayaan usaha garam rakyat

PN 5

- *Tidak ada*

Program-Program Perumahan di Jawa Timur Tahun 2019

1. **Pembangunan rumah susun**
   Pembangunan rumah susun diprioritaskan untuk MBR dan pekerja/ASN dalam rangka penanganan backlog perumahan

2. **Pembangunan rumah swadaya**
   Terdiri dari Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru

3. **Pembangunan rumah khusus**

4. **Pembangunan PSU rumah umum dan komersil**
   Bantuan PSU yang diberikan kepada kawasan perumahan baru yang dikembangkan oleh developer

5. **Fasilitasi Pembiayaan Perumahan**
   Meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

Kriteria teknis masing-masing program dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Pengembangan Layanan Air Minum, Air Limbah, dan Sampah di Jawa Timur Tahun 2019

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Air Minum

Efisiensi pengelolaan penyediaan air minum, melalui:

- Penurunan tingkat kebocoran (NRW).
- Pemanfaatan *idle capacity.*
- Penyediaan jaringan transmisi dan distribusi untuk air baku dan air bersih.
- Gerakan penghematan konsumsi air oleh pelanggan dan masyarakat.

Optimalisasi pemanfaatan sumber air yang tersedia, melalui:

- Revitalisasi sarana tangkapan/pengumpul air baku
- Normalisasi sungai.
- Kerjasama penanganan kuantitas dan kualitas air permukaan dengan daerah berbatasan.

Pengembangan sumber air alternatif, melalui:

- Peningkatan kualitas hasil pengolahan grey water dan black water agar dapat digunakan kembali.
- Optimasi sumur resapan, sumur retensi dan lubang biopori.
- Penggunaan sumber air alternatif.

RENCANA PEMBANGUNAN

1. SPAM Kawasan Khusus* (Lumajang-KSPN)
2. SPAM IKK Hongaria*
3. SPAM Kawasan Perkotaan
4. SPAM Kawasan terfasilitasi

PROYEK PRIORITAS

1. SPAM Regional Umbulan
2. SPAM Regional Mojolamong

Air Limbah Domestik

Pembangunan dan Pengembangan sistem terpusat:

- Pembangunan sistem terpusat (skala permukiman maupun skala kota) untuk kawasan perkotaan padat.

Perbaikan layanan sistem setempat:

- Perbaikan tangki septik → menjadi kedap air
- Pengembangan sistem penyedotan lumpur tinja berkala (*regular desludging*).

Sampah

Penanganan Sampah

- Perluasan cakupan layanan sampah
- Pengawasan penanganan sampah tidak baik (dibuang sembarangan, dibakar), disertai kampanye masif .

Pengurangan Sampah

- Penyediaan sistem pengangkutan terpilah.
- Pengembangan sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, lingkungan permukiman, dan terpusat.

6 KPBU dan PINA Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Pengertian KPBU

KONVENSIONAL

KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PEMBENTUKAN ASET (Pemerintah) → **PELAYANAN MASYARAKAT**

- Bukan privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsesi
- Dapat berupa kegiatan yang: memiliki arus pendapatan (palapa ring), tidak memiliki pendapatan (jalintim)

PERUBAHAN PARADIGMA

KPBU

KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

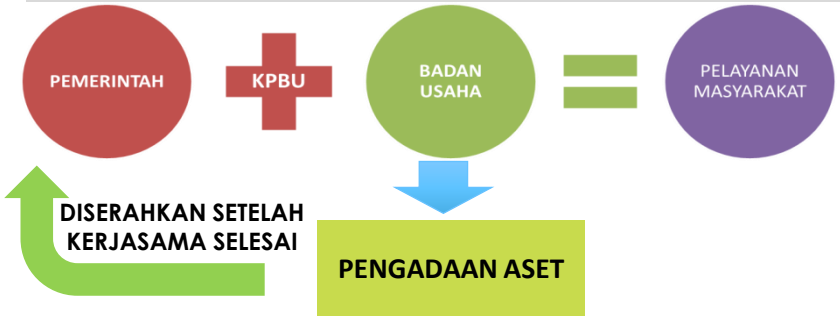

POKOK PEMAHAMAN KPBU				
KERJASAMA PEMERINTAH & BADAN USAHA	KEPENTINGAN UMUM	SPESIFIKASI YG TELAH DITETAPKAN PJPK	SUMBER DAYA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DARI BADAN USAHA	PEMBAGIAN RISIKO

Manfaat KPBU:

- **On schedule, on budget, on service**
  - Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
  - Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
- Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang lebih banyak

Proyek KPBU Provinsi Jawa Timur

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

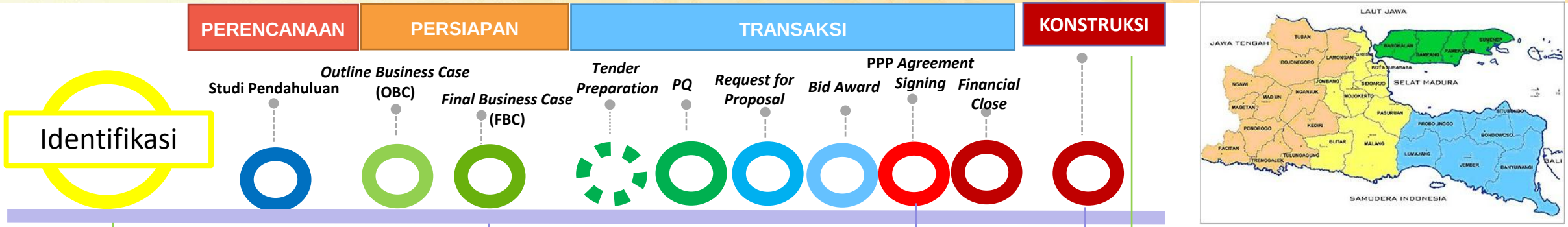

Usulan Pemrov Jawa Timur

1. Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo (2)
2. Terminal Energi Probolinggo (4)
3. Pelabuhan Tanjung Awar-awar Tuban (2)
4. SPAM Bangkalan (4)
5. Jalur Kereta Api Bandara Juanda (2)
6. Fly Over Singosari Malang (2)

Proyek Nasional

Surabaya - Madura Toll Bridge (2)

Proyek Daerah

1. RSUD Sidoarjo (1)

Terdapat dalam PPP Book Bappenas

Proyek Nasional

Probowangi Toll Road (2)

Proyek Nasional

Pandaan - Malang Toll Road (2)

Proyek Daerah

Umbulan (4)
Water Supply

Unsolicited

Krian – Legundi – Bunder - Manyar Toll Road (2)

Proyek-proyek KPBU Provinsi Jawa Timur juga mendukung Program Prioritas Nasional:

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Data per 27/03/2018

PINA Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang Baik di Indonesia

PINA mendorong berbagai aturan dan kebijakan yang **meningkatkan minat investasi**.

PINA menjadi alternatif opsi untuk melaksanakan skema investasi.

	ADVOKASI KEBIJAKAN	SOSIALISASI DAN KOORDINASI	PENINGKATAN TATA KELOLA & REGULASI
Kegiatan	• Melakukan koordinasi dengan OJK untuk relaksasi berbagai aturan dan penerbitan instrumen investasi. • Melakukan koordinasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk kesesuaian aturan keuangan	• Melaksanakan Forum untuk sosialisasi PINA dengan berbagai pemangku kepentingan (PINA *Day*) • Berkoordinasi dengan berbagai asosiasi terkait yang berpeluang menjadi *investee* atau investor	• Pembuatan Rencana Strategis dan Tata Kelola Pelaksanaan PINA. • Melakukan Kajian untuk memperkuat fungsi dan peran PINA di dalam skema pendanaan Investasi.
Dampak	• **Penerbitan Instrumen Investasi baru seperti RDPT dan *Perpetuity Notes/Bond*.** • **Memastikan terlaksananya akuntabilitas di setiap skema investasi yang dilaksanakan.**	• **Meningkatnya minat investor dan *investee* yang menggunakan skema PINA.** • **Meningkatnya Citra Positif Dunia Investasi di Indonesia.**	• **Meningkatnya kualitas proyek yang dapat ditawarkan dan efektifitas dalam proses pelaksanaan skema.** • **Terbitnya berbagai aturan yang menguatkan peran PINA (PP No 17/2017, Perpres No 58/2017, Perpres No 20/ 2016, dsb.)**

Proyek PINA Provinsi Jawa Timur

Waskita Toll Road- Trans Java Toll Road

Ruas : Pasuruan – Probolinggo

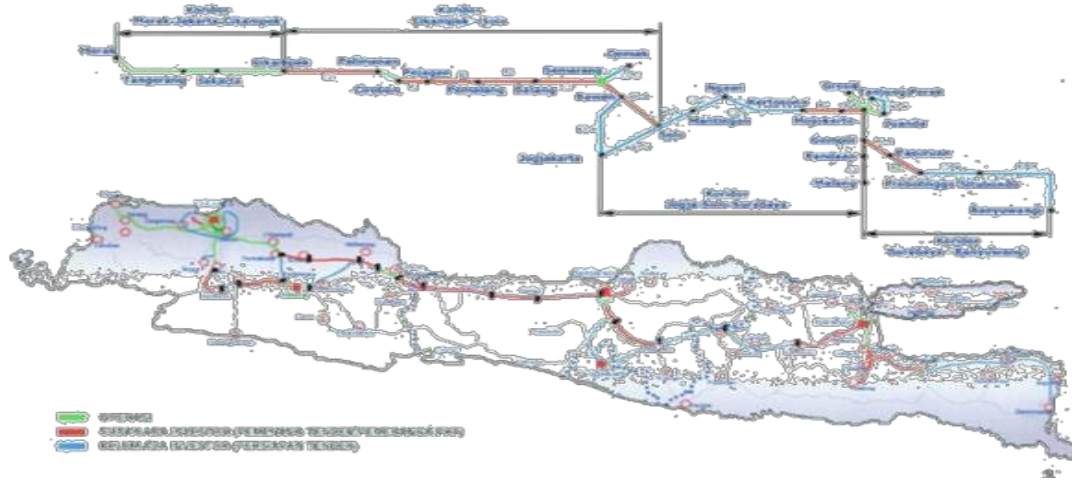

Sources: PINA Center for Private Investment

- Bappenas melalui fasilitasi PINA membantu pihak *investee* (BUMN) untuk mencari sumber-sumber pembiayaan (investor) agar proyek-proyek tersebut yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat memulai konstruksi.
- Untuk mempercepat proses dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah yang berdampak dari proyek-proyek tersebut.

Penutup

- Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.
- Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Jawa Timur perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah.
- Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan:
  - Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan).
  - Perkuatan integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBN) dengan APBD.

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

Lokasi Prioritas Pengentasan Kumuh Di Provinsi Jawa Timur

1	Kab. Pacitan	11	Kab. Bondowoso	21	Kab. Bojonegoro	31	Kota Probolinggo
2	Kab. Ponorogo	12	Kab. Situbondo	22	Kab. Tuban	32	Kota Pasuruan
3	Kab. Trenggalek	13	Kab. Probolinggo	23	Kab. Lamongan	33	Kota Mojokerto
4	Kab. Tulungagung	14	Kab. Pasuruan	24	Kab. Gresik	34	Kota Madiun
5	Kab. Blitar	15	Kab. Sidoarjo	25	Kab. Bangkalan	35	Kota Surabaya
6	Kab. Kediri	16	Kab. Mojokerto	26	Kab. Pamekasan	36	Kota Batu
7	Kab. Malang	17	Kab. Jombang	27	Kab. Sumenep		
8	Kab. Lumajang	18	Kab. Nganjuk	28	Kota Kediri		
9	Kab. Jember	19	Kab. Madiun	29	Kota Blitar		
10	Kab. Banyuwangi	20	Kab. Magetan	30	Kota Malang		

Pipeline Proyek KPBU dan PINA : 10 Bali Baru

Source : Ministry of Tourism, Republic of Indonesia, 2018